



LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS SOSIAL KAB. HSS



Kandangan, 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya jualah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disusun sebagai bahan pertanggungjawaban baik anggaran maupun kegiatan. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab serta meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu diupayakan suatu media pertanggungjawaban.

Pembuatan Laporan Capaian Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pembuatan Laporan Capaian Kinerja selain sebagai media akuntabilitas juga merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan informasi yang berguna bagi pengembangan organisasi.

Laporan Capaian Kinerja ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Laporan Capaian Kinerja berikutnya. Atas segala bantuan, bimbingan dan kerja sama dari semua pihak sehingga tersusunnya Laporan Capaian Kinerja ini kami ucapkan terima kasih.

Kandangan, Januari 2020

Kepala Dinas Sosial
Kab. Hulu sungai selatan,

Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670328 198609 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018. Laporan ini adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2019 mengacu pada RPJMD Kab. HSS dan Revisi Renstra Dinas Sosial Kab. HSS tahun 2018-2023. Tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin;
2. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
4. Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas;
5. Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
6. Meningkatkan perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);
7. Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
8. Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
9. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
10. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin;
2. Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
4. Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas;
5. Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
6. Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);
7. Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;

8. Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
9. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
10. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 20.100.440.800,00 sedangkan realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 18.017.771.444,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,64%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.082.669.356,00 (*termasuk belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai*).

Sedangkan untuk realisasi belanja langsung saja (*diluar gaji dan tunjangan pegawai*) pagu sebesar Rp. 15.959.915.800,00 dengan realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 15.184.698.608,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,14%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 775.217.192,00.

Pencapaian yang diperoleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 merupakan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang optimal oleh seluruh jajaran serta didukung oleh komitmen daerah dalam pembangunan bidang sosial. Diharapkan dukungan ini dapat terus dilanjutkan dalam upaya optimalisasi pembangunan bidang sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan bidang sosial diuraikan sebagai berikut :

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sesuai data dari BPS Kalsel adalah sebesar 6,67%. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 sebesar 4,76%;
2. Belum optimalnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial;
3. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, maka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan;

4. Adanya pergeseran-pergeseran norma yang terus terjadi dimasyarakat dapat melunturkan rasa patriotisme, semangat juang, semangat kepahlawanan dan menghargai para pejuang, oleh karena itu nilai-nilai kepahlawanan perlu terus dilestarikan;
5. Pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial masih perlu lebih ditingkatkan menuju pelayanan prima.

Permasalahan tersebut di atas dapat diberikan dengan solusi dan upaya-upaya sebagai berikut:

- Penanganan permasalahan sosial dengan menggunakan skala prioritas;
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan;
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada;
- Melibatkan peran aktif masyarakat, orsos, ormas, pihak swasta dan pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan bidang sosial;
- Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang baik untuk fasilitasi pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial.

DAFTAR ISI

	Halaman
Bab I : Pendahuluan	
1.Latar Belakang	1
2. Tugas dan Fungsi.....	2
3. Dasar Hukum.....	4
Bab II : Perencanaan Kinerja	
A. Perencanaan Strategis.....	6
B. Indikator Kinerja Utama.....	15
C. Perjanjian Kinerja.....	18
Bab III : Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	
1) Capaian Indikator Kinerja Utama.....	24
2) Pengukuran kinerja atas perjanjian kinerja.....	33
- Evaluasi dan analisa pengukuran kinerja:.....	33
- capaian Indikator Kinerja Utama (IKU);	
- pengukuran capaian kinerja Per Indikator Kinerja Sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi, menguraikan formulasi perhitungan realisasi beserta data dukungnya;	
- analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja per indikator kinerja sasaran serta upaya-upaya yang telah dilakukan;	
- analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja per indikator kinerja sasaran serta serapan anggarannya	
- membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir per indikator kinerja sasaran;	
B. Realisasi Anggaran	
Realisasi Anggaran sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.....	47
C. Daftar Prestasi SKPD tingkat nasional/provinsi dsb.....	49
Bab IV : Penutup	
Kesimpulan.....	50

Latar Belakang

Dalam pembentukan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13 Tanggal 04 Oktober 2016). Sedangkan Tugas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 61 Tanggal 02 Desember 2016) adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial sebagai Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Sosial pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran kepada pemangku

kepentingan. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Sosial;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Sosial dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan bidang sosial diuraikan sebagai berikut :

1. Proses seleksi, Verifikasi dan validasi untuk menentukan individu atau keluarga yang layak menerima program-program pemberdaya sosial memerlukan waktu yang cukup lama.
2. Kemampuan dari penerima manfaat dalam melaksanakan program/ kegiatan pemberdayaan sosial memerlukan waktu yang cukup lama.
3. Masih kurangnya cakupan program / kegiatan pemberdayaan sosial dalam mengintervensi pemberdayaan sosial masyarakat miskin.
4. Tindak lanjut hasil penertiban gepeng tidak memberikan efek jera karena ada beberapa sasaran razia yang kembali terjaring pada razia berikutnya.
5. Masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat dan keluarga terhadap Orang Dengan Gangguan Kejiwan (ODGJ) yang telah direhab sehingga menimbulkan masalah baru.
6. Sulitnya menumbuhkan jiwa kewiraswastaan bagi lulusan PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) dan PSBW (Panti Sosial Bina Wanita) karna beberapa alumnusnya tidak menjadikan bekal hasil pelatihan untuk membuka usaha sendiri padahal sudah diberi bantuan peralatan kerja.
7. Sulitnya merubah pecandu Napza (Narkotika alkohol, pycicotrofika, dan zat adiktif) setelah dilakukan rehab ada kecendrungan masih kembali menggunakan napza.
8. Keluarga miskin belum masuk dalam data SIKS NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Neext Generations) Kemensos sehingga belum optimal mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosil, sedang fakta yang layak mendapatkan program penanggulangan kemiskinan.
9. Perkembangan tingkat/angka kemiskinan sangat dinamis, baik

karena meninggal, pindah dan mampu sehingga mempengaruhi kinerja dan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

10. Alokasi anggaran Bansos Dinas Sosiaal belum mengakomodir biaya tak terduga dan kedaruratan terkait pendampinagan keluarga miskin untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial, sedangkan bansos yang disediakan anggarannya saat ini hanya untuk kebencanaan dan korban tindak kekerasan.

Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;c
2. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Th. 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

A. Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban yang termuat dalam Misi ke-1 dan Misi ke-2 adalah sebagai berikut :

1) Misi ke-1

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2) Misi ke-2

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

3) Tujuan dan Sasaran**a. Tujuan**

Tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merumuskan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Dibidang Sosial mempunyai tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan Sasaran pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin;
2. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;

3. Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
4. Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas;
5. Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
6. Meningkatkan perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);
7. Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
8. Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
9. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
10. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

b. Sasaran

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses pencapaian Misi. Adapun sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Merupakan kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;
2. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka;
3. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
5. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
7. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Hubungan antara tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Hubungan Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Tingkat Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat Pelayanan sosial terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
3	Meningkatkan perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat Perlindungan sosial terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
4	Meningkatkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan Lembaga/organisasi sosial dan relawan/petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial
5	Meningkatkan perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan keuangan Daerah	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah
6	Meningkatkan Pelayanan Administrasi perkantoran	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan pelanggan.

4) Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Dinas Sosial Kabupaten Hulu

Sungai Selatan dalam mengaktualisasikan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Melaksanakan peningkatan kualitas dan peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial;
3. Melaksanakan pelayanan sosial dan pemberian bantuan atau jaminan sosial bagi anak dan lanjut usia terlantar;
4. Melaksanakan pelayanan sosial dan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas;
5. Melaksanakan pelayanan sosial dan bantuan sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
6. Melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS jalanan/tuna sosial lainnya;
7. Melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam;
8. Melaksanakan pelayanan sosial bagi korban tindak kekerasan;
9. Penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
10. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang sosial.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

1. Menyelenggarakan pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin melalui pemberian modal usaha dan pendampingan;
2. Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra);
3. Fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
4. Pembinaan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

5. Pembinaan terhadap anak terlantar/putus sekolah melalui pengiriman anak terlantar/putus sekolah ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) serta pemberian modal usaha;
6. Pemberian bantuan sosial kepada anak yatim dari keluarga miskin;
7. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar;
8. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas;
9. Pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
10. Penertiban, pembinaan dan pemulangan PMKS jalanan/tuna sosial lainnya;
11. Pemberian bantuan sosial kepada korban bencana alam;
12. Pembinaan relawan sosial penanggulangan bencana (TAGANA);
13. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi korban tindak kekerasan;
14. Peringatan hari-hari bersejarah nasional;
15. Pemberian santunan kepada veteran dan janda veteran;
16. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
17. Pemenuhan SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang baik untuk fasilitasi pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial.

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

MISI I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
MISI II : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkat	Meningkat	Melaksanakan	1. Pemberdayaan sosial

kan kualitas hidup keluarga miskin	nya kualitas hidup keluarga miskin	pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan	bagi keluarga miskin melalui pemberian modal usaha dan pendampingan; 2. Penyaluran Beras Sejahtera; 3. Fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Melaksanakan peningkatan kualitas dan peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam usaha kesejahteraan sosial	Pembinaan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Melaksanakan pelayanan sosial dan pemberian bantuan atau jaminan sosial bagi anak dan lanjut usia terlantar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan terhadap anak terlantar/putus sekolah melalui pengiriman anak terlantar/putus sekolah ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) serta pemberian modal usaha; 2. Pemberian bantuan sosial kepada anak yatim dari keluarga miskin; 3. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar lanjut usia terlantar.
Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas	Melaksanakan pelayanan sosial dan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas	Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas
Meningkatkan perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS jalanan / Tuna Sosial lainnya	Penertiban, pembinaan dan pemulangan PMKS jalanan/tuna sosial lainnya
Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Melaksanakan pemberian bantuan sosial kepada korban bencana alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar korban bencana alam; 2. Pembinaan relawan sosial penanggulangan bencana (TAGANA)

Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan	Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan	Melaksanakan pelayanan sosial bagi korban tindak kekerasan	Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar korban tindak kekerasan
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang social	Pemenuhan SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang baik untuk fasilitasi pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial

Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan hari-hari bersejarah nasional; 2. Pemberian santunan kepada veteran dan janda veteran; 3. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
---	--	------------------------------------	---

5) Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
 - Penyediaan jasa dan administrsi Kantor
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyebarluasan Informasi tugas dan pokok dan fungsi SKPD
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi
 - Rapat – rapat koordinasi, konsultasi dan Lapangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan kegiatan:
- Pelindungan Sosial Bagi Anak Terlantar
 - Pelindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar
 - Penyaluran Pangan Bagi Masyarakat Miskin
 - Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana
4. Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) , terdiri dari kegiatan :
- Peningkatan Kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
5. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Keuangan
 - Penyusunan Dokumen AKIP
6. Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari kegiatan :
- Pelayanan Hari-hari Besar Nasional
 - Pelayanan Rujukan Terpadu data Masyarakat Miskin
 - Pelayanan Administrasi bagi Potensi dan sumber
 - kesejahteraan Sosial (PSKS)

-Lomba – lomba bagi Potensi dan sumber kesejahteraan Sosial (PSKS)

7. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :

- Bantuan Usah Bagi Masyarakat miskin
- Bantuan Usah Bagi Anak Terlantar
- Bantuan Usah Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
- Bantuan Usah Bagi Penyandang Disabilitas
- Peyusunan Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera

8. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :

- -Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar
- Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar
- Pelayanan Sosial bagi Penyandang Penyakit Sosial dan Masyarakat Terlantar
- Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas
- Rehabilitasi Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
- Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Penyandang Penyakit Sosial Lainnya.

B .Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan <i>bottom up</i>	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Dinas Sosial	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / Predikat AKIP		Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap	Sekretariat	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

				<p>penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%</p>		<p>Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p>
3	<p>Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>	<p>Persentase Angka PMKS yang mandiri</p>	<p>Belum optimalnya penguatan modal dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan</p>	<p>Jumlah PMKS yang mandiri dibagi jumlah PMKS yang terdata x 100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pemberdayaan Sosial - Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Bidang Perlindungan Sosial 	<p>Pemutakhiran data PMKS oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) di setiap Kecamatan yang ada di Kab. HSS</p>

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Berdasarkan perencanaan strategis terkait sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai, maka pada Tahun 2019 target pencapaian kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Fasilitas bantuan usahan Ekonomi Produktif(UEP) bagi PMKS dengan tepat sasaran.	Jumlah masyarakat memperoleh bantuan usaha ekonomi Produktif (UEP)	130 orang	Program Pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKSO)	1.Bantuan Usaha bagi Masyarakat Miskin	53.608.000
		Jumlah Anak terlantar yang memperoleh bantuan usaha ekonomi Produktif (UEP)	40 orang		Bantuan Usaha bagi Anak Terlantar	61.100.000
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh bantuan usaha ekonomi Produktif (UEP)	8 orang		Bantuan usaha bagi Penyandang Disabilitas	25.100.000
		a.Jumlah Perempuan Rawan Sosial ekonomi (PRSE) yang memperoleh bantuan usaha ekonomi Produktif (UEP) b. Jumlah	20 orang		Bantuan Usaha bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	110.810.000

		Perempuan Rawan Sosial Ekonomi(PRSE) yg memperoleh bimbingan kewirausahaan.	100 orang			
		Jumlah Dokumen Calon penerima rumah yang dibuat sesuai dengan standar.	I Dokumen (365 bh rumah)		Penyusunan Dokumen calon penerima rumah Sejahtera	148.718.500
2	Terlaksananya pelayanan sosial terhadap PMKS dengan tepat sasaran	a. Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial didalam dan diluar panti. b. Persentasi kasus adopsi dan advokasi anak yang ditangani sesuai dengan standar	67 orang 100 persen	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan sosial bagi anak terlantar	112.620.000
		Jumlah lanjut Usia terlantar yg mendapatkan pelayanan sosial didalam dan diluar panti	215 orang		Pelayanan Sosial bagi lanjut Usia Terlantar	93.895.000
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti	160 orang		Pelayanan Sosial bagi penyandang disabilitas	61.100.000
		a. Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial b. Persentase penyandang penyakit sosial lainnya dan masyarakat terlantar yang mendapat pelayanan sosial	90 persen 100 persen		Pelayanan sosial bagi penyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar	122.320.000
	Terlaksananya rehabilitasi sosial terhadap PMKS dengan tepat sasaran	a. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti b. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu tubuh c. Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti Praktek Belajar Kerja	7 orang 12 orang 10 orang		Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas	122.953.200
		Jumlah PRSE yang mendapatkan rehabilitasi sosial	20 orang		Rehabilitasi sosial bagi Perempuan Rawan Sosial	31.158.000

		di dalam panti			Ekonomi	
		Jumlah penyandang penyakit sosial lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial	78 orang		Rehabilitasi sosial bagi tuna sosial dan penyandang penyakit sosial lainnya	46.100.000
3	Terlaksananya perlindungan sosial terhadap PMKS dengan tepat sasaran	a. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana b. Persentase korban tindak kekerasan yang mendapatkan perlindungan sosial	100 pesen 100 persen	Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Perlindungan sosial korban bencana	156.020.000
		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	950 orang		Perlindungan sosial bagi anak terlantar	18.300.000
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	2.347 orang		Perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar	36.100.000
		Penyaluran pangan bagi masyarakat miskin	6.562 KPM		Perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar	6.171.994.000
4	Tersedianya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memenuhi standar kompetensi	a. Jumlah lembaga/organisasi sosial yang dibina dan aktif b. Jumlah relawan/petugas sosial yang dibina dan aktif	58 buah 270 orang	Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	135.970.000
5	Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	15 Dokumen Akip	Program peningkatan Perencanaan, pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen AKIP	4.325.000
	Terpenuhinya dokumen keuangan daerah dari aspek kualitas	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	12 Dokumen Keuangan		Penyusunan Dokumen Keuangan	4.400.000
6	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Gedung kantor kondisi baik	1 tahun	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	103.700.000
		Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	1 tahun		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	145.400.000

		Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	1 tahun		Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	19.650.000
		Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	1 tahun		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	99.867.800
7		Jumlah Basis Data Terpadu kemiskinan yang terverifikasi dan validasi sesuai ketentuan	1 Aplikasi	Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Pelayanan Rujukan Terpadu Data Masyarakat Miskin	454.359.200
		Jumlah pelayanan administrasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan tepat waktu	9 jenis PSKS		Pelayanan Administrasi bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	4.661.731.000
		Jumlah Lomba bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan sesuai ketentuan	4 Lomba		Lomba-Lomba bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	34.769.100
		Jumlah peringatan yang dilaksanakan	4 Peringatan		Pelayanan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah	43.356.200
		a. Jumlah veteran dan janda veteran yang menerima bantuan social b. Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	89 orang 1 lokasi		Pembinaan Kepeloporan, Keperintisan dan Kepahlawanan	156.242.500
		Pelayanan administrasi sesuai standar	1 tahun	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	91.802.000
	sda	1 tahun	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD		14.000.000	
	sda	1 tahun	Penyediaan makanan dan Minuman		23.332.000	
	sda	1 tahun	Rapat-rapat kordinasi, konsultasi dan lapangan		379.750.000	

		sda	1 tahun		Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administarsi / Teknis Lainnya	130.150.000
		sda	1 tahun		Penyediaan Jasa dan administrasi Kantor	80.999.500

Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2019 disusun dengan mengukur capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja ini. Metode pengukuran yang dilaksanakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang (*performance improvement*). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi telah mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur keberhasilan kinerja sasaran, indikator yang dipakai dapat berupa indikator absolut di mana indikator tersebut melekat pada masing-masing kegiatan yaitu : indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output* dan indikator kinerja *outcome*, atau merupakan dampak makro (*outcomes, benefit, impact*) dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Capaian kinerja sasaran diukur dengan membandingkan capaian kinerja *outcome* yang dihasilkan dengan rencana pada masing-masing kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja indikator sasaran.

Indikator kinerja *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan dan pemakaian SDM. Indikator kinerja *output*

berupa hasil yang diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan. Sedangkan indikator kinerja *outcome* berupa manfaat yang diperoleh dari berfungsinya output yang dapat di ukur dalam jangka pendek.

A. Capaian Indikator Kinerja Organisasi

1) Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja organisasi merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka tujuan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada table berikut :

Tabel.1

PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT TRIWULAN II

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian(%)			
				TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50	22,40	22,80	23,10	23,50	22,40	22,80			100%	100%	
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Nilai/Predikat	81,57(A)	0	0	0	81,57(A)	0	0			0	0	
1	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah	Persen	100%	65,22	78,26	86,96	100	65,22	78,26			100%	100%	
1.1	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	10	11	13	15	10	11			100%	100%	
1.2	Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	8	10	11	12	8	10			100%	100%	

Berdasarkan Tabel.1 di atas, Pencapaian Kinerja Urusan Kesekretariatan, sebagai tujuan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, triwulan II ini realisasi yang ada tidak bisa dilaporkan sebagai laporan Realisasi sasaran karena bentuknya kegiatan selama setahun, sehingga output/keluaran akan disampaikan pada triwulan4 (empat). Pada tabel diatas mempunyai program utama sebanyak 1 program dengan kegiatan utama 2 buah. Untuk kegiatan rutin program pendukung terdapat3 buah dan kegiatan pendukung sebanyak 17 buah yang dilaksanakan sesuai rutin pengelolaan dikantor Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yang terkait dengan Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP dan Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan daerah dengan kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP dan Penyusunan Dokumen Keuangan.

Pada indikator kinerja sasaran pertama Indeks Reformasi Birokrasi hasil capaian kami target Triwulan IV namun masih belum bisa diukur karena masih tahap persiapan kegiatan. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang kedua yaitu Nilai/Peringkat AKIP hasil capaian juga kami target pada triwulan IV masih belum bisa diukur karena hasil penilaian evaluasi Laporan AKIP oleh KemenpanRB dilakukan pada triwulanIV.

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, memiliki target kegiatan 78,25% atau jumlah 21 dokumen dari total jumlah 27 dokumen, dimana 15 untuk Dokumen Penyusunan AKIP dan 12 Dokumen dari penyusunan Dokumen

Keuangan. Dari Kegiatan Penyusunan AKIP, telah dilaksanakan sebanyak 10 dokumen di Triwulan I dan 1 dokumen di Triwulan II, tabel sebagai berikut :

NamaDokum		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Berita Acara Reviu Renstra	1 dokumen
3	Cascading Kinerja Tahun 2019	1 dokumen
4	Renja 2019 (Murni)	1 dokumen
5	IKU+SK 2019	1 dokumen
6	PK Murni 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
7	PK Perubahan 2019 S.D Ess Iv Dan Jabatan Fungsional (Staf)	1 dokumen
8	Rencana Aksi 2019	1 dokumen
9	Capaian Kinerja Triwulan Th.2019	2 dokumen
11	Peta Strategi & Struktur Organisasi serta Template Format Keselarasan Kinerja	1 dokumen
Jumla		11 dokumen

Sedangkan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan, pada Triwulan 1 sebanyak 8 Dokumen, dan pada triwulan II sebanyak 2 dokumen.

Aspek pemenuhan untuk Penyusunan Dokumen Keuangan yaitu :

NamaDokum		Jumlah
1	Renstra	1 dokumen
2	Renja	1 dokumen
3	RKBMD pengadaan dan	2 dokumen
4	PRA RKA Murni	1 dokumen
5	RKA Murni	1 dokumen
6	DPA	1 dokumen
7	Laporan Triwulan	2 dokumen
8	Laporan Prognosis Semesteran 1	1 dokumen
Jumla		10 dokumen

Pada indikator kinerja program kami target di tiap triwulan pada aspek pemenuhan dokumen untuk kegiatan pelaporan AKIP yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan dan Akhir Tahun, serta aspek pemenuhan dokumen untuk pelaporan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap Triwulan, Semester dan Akhir.

Tabel2
PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN URUSAN WAJIB SOSIAL

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian(%)			
				TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	65,74	39,29	19,61	6,57	0,27	37,63	13,25	3,39	6,02	95,77	67,57	51,60	2229
1	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	5,72	0	0	5,55	0,17	0	0	1,61	4,45	0	0	29,01	2623
1.1	Bantuan Usaha bagi Masyarakat Miskin	Orang	130	0	0	130	0	0	0	0	120	0	0	0	92,31
1.2	Bantuan Usaha bagi Anak Terlantar	Orang	40	0	0	20	20	0	0	0	37	0	0	0	95
1.3	Bantuan Usaha bagi Penyandang Disabilitas	Orang	8	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	100
1.4	Bantuan Usaha bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Orang	20	0	0	20	0	0	0	0	30	0	0	0	150
	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang memperoleh Bimbingan Kewirausahaan	Orang	100	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	100

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian(%)				
				TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.5	Penyusunan Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera	Jumlah Dokumen Calon Penerima Rumah Sejahtera yang dibuat sesuai dengan standar	Orang	1 Dokumen (365 buah rumah)	0	0	365	0	0	0	187	223	0	0	51,23	125
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	6,02	0,57	0	5,45	0	0,56	0,12	3,27	3,19	100	100	59,89	379
		Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	3,54	0,67	0,31	1,84	0,72	0,67	0,59	1,77	0,22	100	190	96,20	30,56
2.1	Pelayanan Sosial bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam dan di luar panti	Orang	67	37	0	30	0	31	0	0	32	83,78	0	0	32
		Persentase kasus adopsi dan advokasi anak yang ditangani sesuai dengan standar	Persen	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Pelayanan Sosial bagi lanjut usia terlantar	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam dan di luar panti	Orang	215	5	0	210	0	5	0	210	0	100	0	100	0
2.3	Pelayanan Sosial bagi penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti	Orang	160	0	0	160	0	0	0	0	160	0	0	0	160
2.4	Pelayanan sosial bagi penyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial	Persen	90	90	90	90	90	100	100	100	100	111	111	111	111

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan(output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian(%)			
				TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.5	Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas	Orang	7	6	0	1	0	6	0	1	0	100	0	100	0
		Orang	12	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	100	0
		Orang	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	100	0
2.6	Rehabilitasi sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	20	10	10	0	0	10	10	0	0	100	100	0	0
2.7	Rehabilitasi sosial bagi tuna sosial dan penyandang penyakit sosial lainnya	Orang	78	8	11	33	26	8	11	40	8	100	100	121	30,78
3	Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	74,64	49,68	24,96	0	0	48,06	16,87	0,65	1,66	96,74	67,59	63	166
3.1	Perlindungan sosial korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan(output)	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian(%)			
				TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2	Perlindungan sosial bagi anak terlantar	Orang	950	0	950	0	0	0	347	0	38	0	36,52	0	38
3.3	Perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar	Orang	2.347	0	2.347	0	0	0	1.890	0	107	0	80,53	0	107
3.4	Penyaluran pangan bagi masyarakat miskin	KPM	6.562	6.562	6.562	6.562	6.562	6.294	6.252	6.076	6.060	95,92	95,23	92,6	92,4
4	Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persen	56,07	25,30	2,91	13,50	14,36	27,18	5,30	6,84	16,75	107,43	182,13	50,67	116
4.1	Peningkatan kompetensi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Buah	58	0	6	36	16	0	26	15	17	0	433	41,67	106
		Orang	270	148	11	43	68	159	5	25	81	107,43	45,45	58,14	119

Berdasarkan tabel 2 diatas, Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu sebagai urusan wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial mempunyai sasaran strategis dan mempunyai target yang harus dicapai. Terkait Pencapaian Kinerja untuk indikator **Persentase Angka PMKS yang Mandiri** sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pelaksanaan pelayanan dasar bagi masyarakat dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yaitu melalui pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menuju PMKS yang mandiri. Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai 4 program dengan 17 kegiatan. Capaian indikator **Persentase Angka PMKS yang Mandiri** diperoleh dari formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mandiri} \times 100\%}{\text{Jumlah PMKS yang terdata}} = \frac{10.249 \times 100\%}{16.982} = 60,85\%$$

2) Pengukuran, Evaluasi dan analisa Kinerja Atas Perjanjian Kinerja

Pada table diatas dapat dilihat kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target tahun 2019 sehingga dapat dilihat capaian indikator program dan indikator kinerja utama, uraiannya adalah sebagai berikut :

1. **Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)** dengan target Tingkat Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 5,72% terealisasi 6,06%.

Indikator Tingkat Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diperoleh dari formulasi sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan} \times 100 \%}{\text{Jumlah PMKS yang terdata}}$	$\frac{705 \times 100\%}{11.638} = 6,06 \%$
---	---

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) pada Tahun 2019 sebanyak 120 KK dari yang ditargetkan sebanyak 130 KK. Kurang dari target dikarenakan setelah verifikasi dan validasi terdapat calon penerima bansos yang tidak memenuhi persyaratan.
- Pemberian bantuan peralatan modal usaha bagi Siswa PSBR yang telah selesai mengikuti pelatihan keterampilan sesuai dengan jurusan yang diikuti sebanyak 37 orang dari 40 orang yang ditargetkan.
- Penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) sebanyak 8 orang dari yang ditargetkan sebanyak 8 orang Penyandang Disabilitas.
- Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 30 orang dari target 20 orang.
- Pembinaan dan pelatihan keterampilan kewirausaha bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 100 orang dari 100 orang yang ditargetkan.
- Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 410 KK. Pendanaan bersumber dari APBD Kab. HSS.

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Dukungan sumber daya manusia yang potensial;
- Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sarjana Pendamping Desa, Relawan Sosial lainnya dan Dunia Usaha yang turut mendukung program pemberdayaan sosial;
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai;
- Adanya motivasi dan keinginan masyarakat penerima program/kegiatan untuk berubah menjadi lebih baik.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Proses seleksi, verifikasi dan validasi untuk menentukan individu atau keluarga yang layak menerima program-program pemberdayaan sosial memerlukan waktu yang cukup lama;
- Regulasi atau prosedur pemberian program-program pemberdayaan sosial pada skala nasional dan daerah yang berubah-ubah;
- Kemampuan dari penerima manfaat dalam melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan sosial yang diterima masih rendah;
- Masih kurangnya cakupan program/kegiatan pemberdayaan sosial dalam mengintervensi pemberdayaan sosial masyarakat miskin.

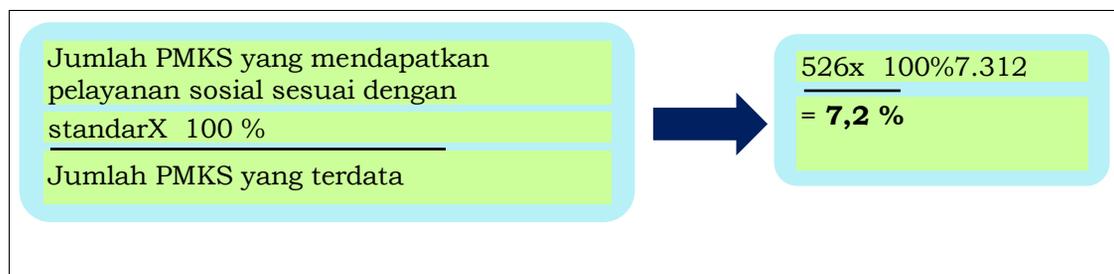
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu

⋮

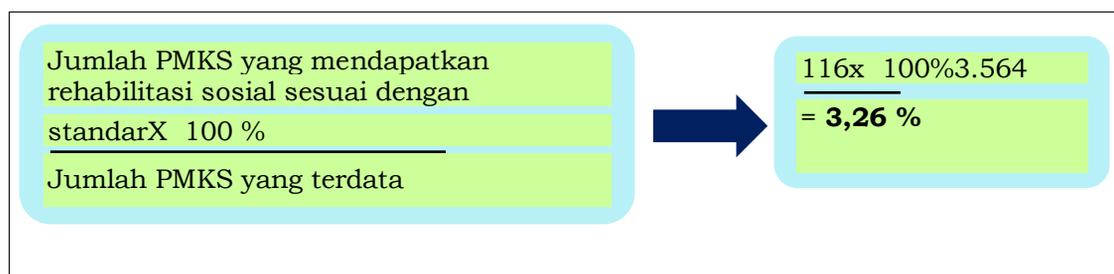
- Melakukan koordinasi lintas sektoral;
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan bidang sosial;

- Memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin penerima program pemberdayaan sosial;
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.

2. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** dengan targetTingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)6,02% terealisasi 7,2% dantarget Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)3,54% terealisasi 3,26%. Indikator Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)diperoleh dari formulasi sebagai berikut:



Indikator Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diperoleh dari formulasi sebagai berikut:



Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Fasilitasi Pembinaan terhadap anak terlantar melalui pengiriman ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) di Banjarbaru sebanyak 40 orang untuk mengikuti

pembinaan bakat dan keterampilan dan nantinya akan diberikan peralatan modal usaha sesuai dengan jurusan yang diikutinya;

- Fasilitasi Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) sebanyak 15 orang berupa pengiriman, penjemputan, visitasi dan uang saku;
- Penyerahan Bantuan berupa Pakaian dan Pelengkapan Alat Sekolah sebanyak 10 orang;
- Fasilitasi Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) sebanyak 5 orang berupa pengiriman, penjemputan, visitasi dan uang saku;
- Penyerahan bantuan Sembako kepada 160 orang Penyandang Disabilitas;
- Penyerahan Paket Sembako untuk Lansia sebanyak 200 orang;
- Pemberian Pakaian untuk Lansia sebanyak 10 orang;
- Penertiban gelandangan dan pengemis bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. HSS, penanganan terhadap masyarakat terlantar dan penyandang penyakit sosial berupa pemulangan ke daerah asalnya. Gelandangan dan pengemis yang ditertibkan akan menandatangani surat pernyataan untuk tidak menjadi gelandangan dan pengemis lagi. Gepeng yang ditertibkan selama tahun 2019 sebanak 79 orang dan pemulangan masyarakat terlantar sebanyak 9 orang.
- Fasilitasi Pengiriman ke panti rehabilitasi penyandang disabilitas sebanyak 7 orang;
- Pembinaan dan pelatihan keterampilan melalui pengiriman ke Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) sebanyak 20 orang dan pemberian bantuan peralatan modal usaha

setelah selesai mengikuti pelatihan keterampilan sesuai dengan jurusan yang diikuti yang terdiri dari : Bahan dan peralatan tata rias, tata boga, tata busana/menjahit.

- Pemulangan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) sebanyak 20 orang dengan rincian untuk BWBLP Dalam Daerah sebanyak 11 orang dan luar daerah sebanyak 9 orang.
- Fasilitasi bahan perawatan diri untuk Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGK) sebanyak 15 Orang.
- Fasilitasi penyerahan Alat bantu bagi Penyandang disabilitas sebanyak 12 orang dengan rincian berupa kursi roda sebanyak 6 buah, krak (tongkat ketiak) 2 buah, dan kaki palsu 4 buah.
- Paktek belajar kerja bagi penyandang disabilitas sebanyak 10 orang
- Bimbingan sosial bagi korban penyalahgunaan napza sebanyak 25 orang.
- Fasilitasi penyandang disabilitas mental/ekspsikotik pada Balai Rehabilitasi penyandang disabilitas mental sebanyak 5 orang.
- Faslitiasti penyandang psikotik ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebanyak 2 orang.

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Relawan Sosial lainnya yang mendukung upaya penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial;
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang tersedia belum dapat bekerja secara optimal untuk melakukan pendampingan terhadap penyandang penyakit sosial / PMKS jalanan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya;
- Ketergantungan terhadap bantuan sosial yang diberikan masih tinggi;
- Masih kurangnya cakupan program/kegiatan dalam rangka peningkatan perubahan perilaku PMKS jalanan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu

:

- Melakukan koordinasi lintas sektoral;
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam proses pembangunan bidang sosial;
- Memberikan pendampingan kepada penyandang penyakit sosial;
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.

Dokumentasi Kegiatan Pendukung



Penanganan gelandangan/pengemis dan masyarakat terlantar



Penanganan orang dengan gangguan jiwa

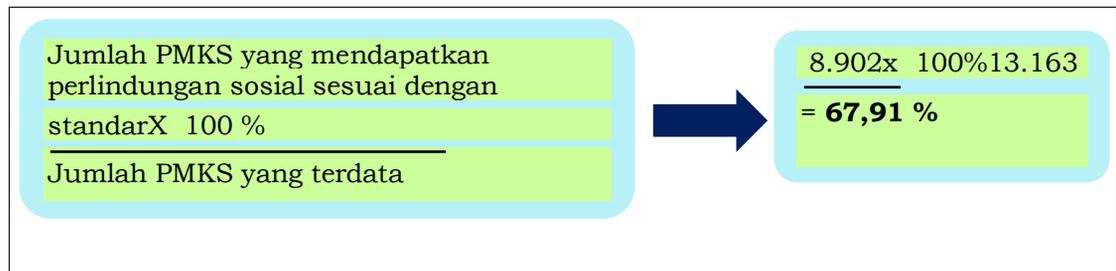


Penanganan mayat terlantar

3. Program Perlindungan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target Tingkat perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 74,64% terealisasi 67,91 %.

Indikator Tingkat perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diperoleh dari formulasi sebagai berikut:



Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Fasilitasi tanggap darurat korban bencana berjumlah 83 KK/263 jiwa, yaitu : Kebakaran 78 KK/240 jiwa, pohon tumbang 8 KK/18 jiwa, puting beliung 1 KK/5 jiwa berupa penyediaan barang bantuan bencana pangan (sembako) dan peralatan dapur korban bencana serta penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana, fasilitas dapur umum, dan fasilitas evakuasi bencana;
- Fasilitasi Penyerahan Bansos Program BERUPAYA (Bersama Peduli Anak Yatim) sebesar

Rp.1.200.000/orang/tahun sebanyak 276 orang anak dan PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) sebesar Rp.1.200.000/orang/ tahun kepada 109 orang anak dari keluarga miskin;

- Fasilitasi Penyerahan bantuan Jaminan Hidup Lansia (Jadup Lansia)Rp.2.700.00/orang/tahun untuk 1997 orang Lansia;
- Rastra Daerah diberikan kepada 6.257KPM dari keluarga miskin yang belum terakomodir dalam data penerima Bansos Pangan (Rastra Pusat dan Bantuan Pangan Non Tunai).

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sarjana Pendamping Desa dan Relawan Sosial lainnya yang mendukung upaya penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial;
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Proses seleksi, verifikasi dan validasi untuk menentukan individu penerima bantuan sosial memerlukan waktu yang cukup lama;
- Prosedur pemberian bantuan sosial yang selektif;
- Ketergantungan terhadap bantuan sosial yang diberikan masih tinggi;
- Masih kurangnya cakupan program/kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar anak dan lanjut usia terlantar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu

:

- Melakukan koordinasi lintas sektoral;

- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam proses pembangunan bidang sosial;
- Memberikan pendampingan kepada penerima program bantuan sosial;
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.

Dokumentasi Kegiatan Pendukung



Kegiatan Pemberian bantuan tanggap darurat untuk korban bencana



Penyaluran Bansos Program Bersama untuk Peduli Anak Yatim (BERUPAYA) dan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)



Penyerahan bansos BERUPAYA dan PKSA oleh Bupati HSS kepada anak yatim/ terlantar dari keluarga miskin



Penyerahan bantuan bahan pangan (sembako) oleh Bupati HSS kepada lanjut usia terlantar



Penyerahan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) oleh Bupati HSS kepada lanjut usia terlantar

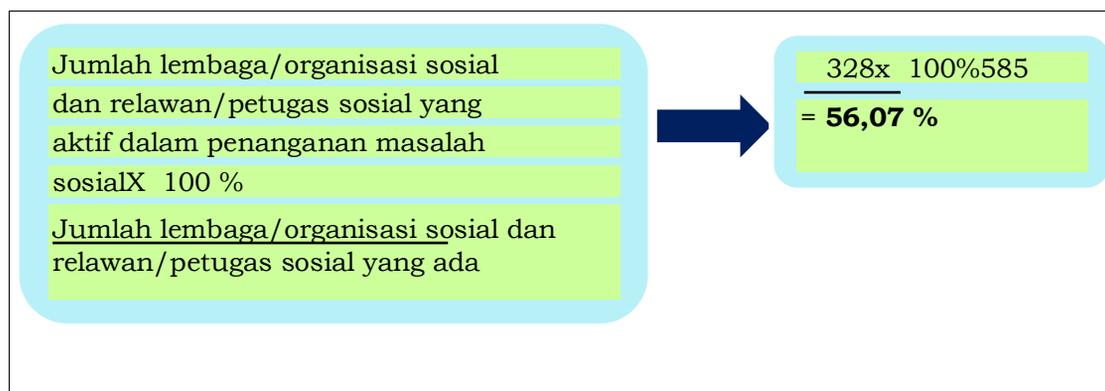


Bupati Kab. HSS menyerahkan bantuan Beras Sejahtera gratis kepada masyarakat miskin



4. **Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** dengan target Cakupan Lembaga/Organisasi sosial dan relawan/ petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial 56,07% terealisasi 56,07%.

Indikator Cakupan Lembaga/Organisasi sosial dan relawan/ petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial diperoleh dari formulasi sebagai berikut:



Kegiatan yang dilaksanakan :

- Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 16 buah, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1 buah, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat 10 buah dan Karang Taruna 31 Buah.
- Pelaksanaan Sosialisasi Pemantapan Tupoksi Sarjana Pendamping Desa Sejahtera sebanyak 148 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 11 orang dan Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 25 orang.
- Fasilitasi kegiatan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 43 orang.
- Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 43 orang.

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sarjana Pendamping Desa dan Relawan Sosial lainnya yang mendukung upaya penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Masih ada beberapa PSKS yang belum kompeten di bidangnya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu

:

- Perlu terus melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan/kompetensi terkait bidang tugas serta pembekalan mengenai etika birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- Melaksanakan lomba untuk PSKS guna memberikan motivasi dan semangat agar terus berprestasi.

Dokumentasi Kegiatan Pendukung



Rapat koordinasi dan pembinaan terhadap TKSK yang ada pada 11 Kecamatan



Bimtek aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data PMKS dan PSKS kepada TKSK



Monitoring dan evaluasi Sarjana Pendamping Desa Sejahtera (Samping Desa Sejahtera)



Rapat Koordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Dari seluruh hasil capaian kinerja urusan/bidang terkait yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan rangkuman capaian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel3.3

**CAPAIAN KINERJA TRIWULANII TAHUN 2019
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator KinerjaTujuan/Sasaran Strategis dan Sasaran Program	Satuan	Target Tujuan/Sasaran/ /Program Tahun2019	Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Status				Keterangan
				TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik danbersihserta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks ReformasiBirokrasi	Persen	23,50	22,40	22,80	23,10	23,50	22,40	22,80	22,40	22,80					
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Orang	81,57(A)	0	0	0	81,57(A)	0	0	0	0					
Meningkatnya pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi, serta perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Angka PMKS yang mandiri	Persen	65,74	39,29	19,61	6,57	0,27	37,63	13,25	3,39	6,02					

Keterangan :  Capaian > 100%
 Capaian > 90%  % Capaian > 75%- 90%
 Capaian < 50

B. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian dan sisa anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Realiasi Anggaran Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan jasa dan administrasi kantor	80.999.500	78.669.330	97,12	2.330.170
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	91.802.000	62.421.755	68,00	29.380.245
	Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	14.000.000	14.000.000	100,00	0
	Penyediaan makanan dan minuman	23.332.000	23.332.000	100,00	0
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	97.750.000	86.550.000	88,54	11.200.000
	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	379.750.000	358.997.873	94,54	20.752.127
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	-Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99.867.800	89.417.800	89,54	507.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	110.674.000	110.220.000	99,59	801.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	155.250.000	88.596.600	57,07	165.864.150
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	19.650.000	9.100.000	46,31	65.850.000
3.	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan dokumen keuangan	4.400.000	3.600.000	81,82	800.000
	Penyusunan dokumen AKIP	4.325.000	3.525.000	81,50	800.000
4.	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah				
	Pelayanan kegiatan hari-hari besar nasional daerah	221.420.000	206.859.000	93,42	14.561.000
	Pelayanan rujukan terpadu data masyarakat miskin	457.959.200	446.259.200	97,45	11.700.000
	Pelayanan administrasi bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	4.661.731.000	4.476.940.000	96,04	184.791.000
	Lomba-lomba bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial	34.769.100	23.645.100	68,01	11.124.000

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	(PSKS) Pembinaan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan	156.242.500	113.056.500	72,36	43.186.000
5.	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				
	Bantuan Usaha bagi masyarakat miskin	53.608.000	48.652.000	90,76	4.956.000
	Bantuan usaha bagi anak terlantar	115.100.000	114.799.300	99,74	300.700
	Bantuan usaha bagi perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)	141.910.000	139.086.500	98,01	2.823.500
	Bantuan usaha bagi penyandang disabilitas	25.100.000	25.100.000	100	0
	Penyusunan dokumen calon penerima rumah sejahtera	205.288.500	205.288.500	100	0
6.	Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				
	Peningkatan kompetensi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	474.195.000	452.629.700	95,45	21.565.300
7.	Program perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				
	Perlindungan sosial bagi anak terlantar	18.300.000	17.793.000	97,23	507.000
	Perlindungan sosial bagi lanjut usia terlantar	36.100.000	35.299.000	97,78	801.000
	Penyaluran pangan bagi masyarakat miskin	7.530.226.000	7.364.361.850	97,80	165.864.150
	Perlindungan sosial korban bencana	156.020.000	90.170.000	57,79	65.850.000
8.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	Pelayanan sosial bagi anak terlantar	113.580.000	98.767.000	86,96	14.813.000
	Pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar	93.895.000	86.630.400	92,26	7.264.600
	Pelayanan sosial bagi penyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar	122.320.000	75.643.100	61,84	46.676.900
	Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	122.953.200	112.685.100	91,65	10.268.100
	Rehabilitasi sosial bagi perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)	31.158.000	30.933.000	99,28	225.000
	Rehabilitasi sosial bagi tuna sosial dan penyandang penyakit sosial lainnya	46.100.000	35.550.000	77,11	10.550.000
	Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	60.140.000	56.120.000	93,32	4.020.000

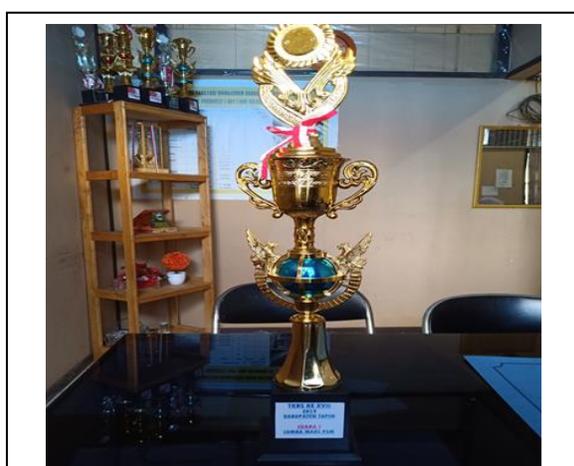
C. Prestasi / Penghargaan

Prestasi yang diraih oleh Dinas Sosial Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

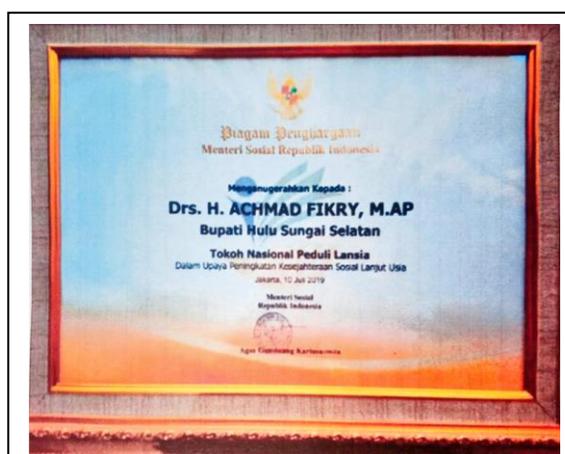
Daftar Prestasi / Penghargaan

NO	NAMA KEJUARAAN/ KEGIATAN	TINGKAT	PRESTASI	KETERANGAN
1	Tokoh Nasional	Nasional	Penghargaan	Penghargaan Tokoh Nasional Peduli Lansia Tahun 2019
2.	Lomba Berprestasi Tingkat Provinsi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Provinsi	Juara II	An. LKS Tarbiyatull Furqan Kel. Jambu Hilir Kecamatan Kandangan
3.	Seleksi Pekerja Sosial Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi	Juara II	An. Rahmanuddin Husaini PSM Desa Hamak Utara Kecamatan Daha Utara
4.	Lomba Temu Karya Bakti Sosial XVII 2019	Provinsi	Juara 1	Diadakan Di Kabupaten Tapin Tanggal 15 Desember 2019

Dokumentasi Piala / Penghargaan



Piala Pemenang Lomba Temu Karya Bakti Sosial XVII 2019



Penghargaan Tokoh Nasional Peduli Lansia Tahun 2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kab. HSS dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan sebanyak 4 Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Sosial (diluar Program Non Teknis) sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai, yaitu

1. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target Tingkat Pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 5,72% terealisasi 6,06%. Indikator Tingkat Pemberdayaansosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan target Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 6,02% terealisasi 7,2% dan target Tingkat rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3,54% terealisasi 3,26%. Indikator Tingkat pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

3. Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target Tingkat perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 74,64% terealisasi 67,91 %.

Indikator Tingkat perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

4. Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan target Cakupan Lembaga/Organisasi sosial dan relawan/ petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial 56,07% terealisasi 56,07%.

Indikator Cakupan Lembaga/Organisasi sosial dan relawan/ petugas sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.20.100.440.800,00 sedangkan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp.18.017.771.444,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,64%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.2.082.669.356,00 (*termasuk belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai*).

Sedangkan untuk realisasi belanja langsung saja (*diluar gaji dan tunjangan pegawai*) pagu sebesar Rp. 15.959.915.800,00 dengan realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.15.184.698.608,00 ataudengan serapandana APBD mencapai 95,14%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.775.217.192,00.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2019 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua khususnya Dinas Sosial Kab. HSS dan sebagai gambaran Kinerja Dinas Sosial Kab. HSS atau pun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.